



Judul : Senayan Soroti Temuan BPK : Program Kemendes Kelebihan Bayar
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Senayan Soroti Temuan BPK Program Kemendes Kelebihan Bayar

ANGGOTA Komisi V DPR Jendri Alting Keintjem menyoroti temuan kelebihan bayar dalam sejumlah kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Temuan itu dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Kemendes PDTT tahun 2022.

Jendri mewanti-wanti agar persoalan kelebihan bayar ini tidak dipandang remeh karena pertanggungjawaban program di pedesaan dan daerah tertinggal.

Berdasarkan evaluasi APBN tahun sebelumnya, laporan keuangan Kemendes PDTT, dari kuantitas memang sudah cukup baik. Apalagi BPK sudah memberikan opininya terhadap kementerian ini sudah cukup bagus.

Sayangnya, BPK masih memberikan catatan dan rekomendasi yang ternyata temuan auditor keuangan negara ini lebih kepada persoalan kelebihan bayar.

"Padahal Indonesia, sebagian besar (struktur pemerintahan terbawahnya) desa. Kalau hampir semua desa mengalami kelebihan bayar, nanti negara ini akan kelebihan bayar," kata Jendri dalam rapat kerja bersama Kemendes PDTT di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menghargai tekad Kemendes PDTT untuk zero temuan dalam setiap penggunaan anggarannya. Hanya saja, hal ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Toh, selama ini belum pernah ada kementerian atau lembaga itu bersih dari temuan.

"Kan sama saja dengan kita sebagai manusia, tidak ada yang sempurna," katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap, Kemendes PDTT bisa lebih responsif terhadap aspirasi dari dewan. Sebab, aspirasi dewan tidak dapat direspons lantaran adanya perubahan regulasi.

Dia memberikan contoh aspirasi pembangunan jalan di desa wisata yang gagal ter-

laksana setelah ada perubahan aturan di Kemendes PDTT.

"Jadi mohon dibenahi aturan-aturannya, karena kemarin ada (program apirasi) jalan ke daerah wisata tapi ternyata diganti. Tidak boleh," ujarnya.

Padahal, masyarakat di desa wisata sudah antusias dengan program tersebut, menyiapkan jalan dan membersihkan jalan yang akan dibangun.

"Tetapi tiba-tiba keluar peraturan dari kementerian bahwa tidak boleh lagi ada (pembangunan) jalan ke daerah wisata, sehingga harus diubah lagi," ujarnya.

Jendri mengatakan, saat ini sudah banyak desa yang meminta agar daerahnya diangkat menjadi desa wisata. Karena itu, dia mengusulkan anggaran Kemendes PDTT untuk anggaran tahun 2024 bisa jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Anggota Komisi V DPR Anwar Hafid menambahkan, jika melihat hasil temuan kerugian negara atas hasil LHP BPK kepada Kemendes PDTT masih terbilang minim.

Karena itu, jika dibandingkan jumlah temuan potensi kerugian negara sebesar Rp 5 miliar, dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 yang mencapai hampir Rp 3 triliun, Kemendes PDTT masih pantas memperoleh Wajar Tanpa Pengacualan (WTP) dalam laporan keuangannya tahun 2022.

"Karena masih ambang batas 3 persen dari total yang biasa kalau ukuran BPK. Saya berharap ke depan mudah-mudahan zero temuan," ujarnya.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan, sejak tahun 2016 hingga 2021, Kemendes PDTT selalu meraih WTP dari BPK. Namun khusus untuk tahun 2021, agak sedikit berbeda karena audit BPK juga terhadap laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri pada Program Tekad.

"Tekad memang koornya di Kemendes, sehingga audit BPK ada di Kemendes," katanya. ■ KAL